

Implementasi Kebijakan Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur

Nanda Yulinar¹, M. Akmal², Iskandar Zulkarnaen³, Muhammad Bin Abubakar⁴, Zulhilmi⁵

^{1,2,3}Program Magister Administrasi Publik, Fisipol, Universitas Malikussaleh, Aceh

*Corresponding Author: Email: makmal@unimal.ac.id

Abstrak

Studi ini mengkaji pengembangan Kawasan Minapolitan Aceh Timur, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyusun 2 (dua) dokumen pendukung yaitu RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) dan Master Plan Minapolitan Aceh Timur (Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2022). Kebijakan Minapolitan merupakan salah satu intervensi yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan produktifitas kelautan dan perikanan melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Hasil penelitian menyampaikan bahwa kelembagaan kawasan minapolitan di dalam kolaborasi bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai leading sektor, sebagai pendukung BPBAP dalam melaksanakan riset, sebagai anggota kolaborasi dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), serta dukungan masyarakat Desa Matang Rayeuk berada di lingkungan kawasan minapolitan belum berjalan dengan baik. Diantara 7 Kecamatan yang mempunyai tambak terintegrasi Hanya di kawasan Desa Matang Rayeuk yang sudah melakukan pengembangan klaster tambak udang vaname seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kawasan minapolitan yang terintegrasi tambak bias dikembangkan menjadi klaster tambak berkelanjutan namun anggaran belum memadai. Pemerintah harus lebih banyak mensosialisasikan tentang program klaster ini kepada masyarakat setempat agar masyarakat lebih yakin untuk memberikan surat tanah dan memenuhi kebutuhan lahan tambak untuk program klaster ini, dan bias memenuhi sarana dan prasaran yang dibutuhkan seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tandon air.

Kata kunci: Kolaborasi, Stakeholder, Pengembangan, Kawasan, Minapolitan.

Pendahuluan

Kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengambil organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama. (Purwanti, Nurul D, 2008). *Collaborative Governance* sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi program Pemerintah. *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan berbagai *stakeholder*. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan *stakeholder* maupun masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan tujuan, visi misi norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kwenangan untuk mngambil keputusan secara *independent* walaupun terikat pada kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan kerjasama antar *stakeholder* atas dasar prinsip bersama untuk mencapai

tujuan tertentu termasuk dalam pengembangan kawasan minapolitan yang juga merupakan tugas dari pemerintah. (Ansell dan Gash, 2007).

Kawasan minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Fungsi utama yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Dalam rangka pengembangan Kawasan Minapolitan Aceh Timur, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyusun 2 (dua) dokumen pendukung yaitu RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) dan Master Plan Minapolitan Aceh Timur (Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2022). Kebijakan Minapolitan merupakan salah satu intervensi yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan produktifitas kelautan dan perikanan melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Regulasi program tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, kebijakan ini di tetapkan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas masyarakat di Kawasan pesisir (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2013).

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya pengembangan Kawasan minapolitan di Kabupaten Aceh Timur melaksanakan program klaster tambak budidaya udang vanname. Program ini dilaksanakan sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 13/DJPB-KKP/KB/IV/2021 tentang Program *Integrated and Revitalization Shrimp Farming*, tambak-tambak yang sebelumnya dikelola secara tradisional oleh masyarakat, kemudian melalui program KKP, tambak direvitalisasi menjadi tambak udang model klaster dengan produktivitas yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya dan lebih ramah lingkungan. (RPJMN 2020-2024: 32).

Tambak yang Ada di Aceh Timur

No.	Area Tambak yang Ada di Aceh Timur	
1.	Desa Paya Gajah	Desa Matang Rayeuk
2.	Kecamatan Idi Rayeuk	Desa Matang Pineung
3.	Kecamatan Idi Timur	Kecamatan Simpang Ulim
4.	Kecamatan Peudawa	Kecamatan Nurussalam
5.	Kecamatan Peureulak	Kecamatan Sungai Raya
6.	Kecamatan Peureulak Barat	Kecamatan Julok

Dinas Kelautan dan Perikanan (02 november 2022)

Beberapa kecamatan diatas adalah wilayah minapolitan yang terdapat tambak tradisional yang berada di Aceh Timur namun yang di gunakan sebagai lokasi pembangunan Klaster Tambak Udang Vanname hanya beberapa tambak yaitu tambak yang ada di Desa Matang Rayeuk, Desa paya gajah, Desa Matang Pineung, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peudawa dan Kecamatan Idi Timur, dan yang tambak yang berlaian hingga saat ini adalah tambak yang ada di desa Matang Rayeuk dan tambak yang ada di desa Paya Gajah. Pemilihan Aceh Timur sebagai lokasi pembangunan Klaster Tambak Udang Vaname Berkelanjutan di Aceh, karena Aceh Timur memiliki kondisi alam yang masih sangat mendukung, dimana kualitas air sangat baik, serta lahan yang

tersedia cukup luas. Minat masyarakat akan budidaya udang vaname juga besar, tambak yang sebelumnya mangkrak dan kurang produktif, kini mulai produksi. Bahkan, peningkatan produksi tersebut berkorelasi positif dengan bertambahnya luasan tambak budidaya udang, Program revitalisasi tambak juga mampu menyerap tenaga kerja baik musiman maupun pekerja. Harapannya dengan program ini mampu meningkatkan dan menyejahterakan masyarakat pesisir, sehingga ekonominya lebih bangkit dan taraf hidupnya lebih meningkat. Kegiatan ini merupakan upaya KKP untuk membuat model Klaster Tambak Udang Vaname Berkelanjutan yang dapat direplikasi oleh masyarakat dan investor dalam rangka menggenjot produksi udang 2 juta ton pada tahun 2024. (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya).

Proses kolaborasi antar *stakeholder* diawali dengan adanya pertemuan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat yang membahas mengenai persiapan klaster tambak udang terintegrasi dan mengungkapkan hal-hal yang menjadi hambatan pemerintah dalam proses pelaksanaannya. Setiap *stakeholder* memberikan bentuk dukungan terhadap pengembangan klaster tambak budidaya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing seperti pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertindak sebagai pemberi binaan kepada pembudidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan bantuan dana, pihak Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) mengembangkan klaster tambak udang vanname, Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) berkontribusi terhadap pembudidaya udang vanname. Aktor-aktor tersebut merupakan pihak yang memberi dukungan dan sumbangsi positif terhadap kegiatan pengembangan kawasan minapolitan berbasis udang vanname. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan maupun sumber daya menjadikan pemerintah untuk melaksanakan kerjasama berbagai pihak baik dengan masyarakat maupun pihak-pihak lainnya sehingga dapat mencapai suatu tujuan (Subarsono, 2016, hlm. 174).

Adanya kolaborasi diharapkan Pengelolaan klaster tambak budidaya udang vaname berkelanjutan lebih terarah karena ada pembagian tugas wewenang, tanggung jawab dan sebagainya. Namun dalam praktiknya disinyalir bahwa kolaborasi yang muncul antar *stakeholder* masih diwarnai banyak masalah seperti sikap dan persepsi para *stakeholder* yang tidak sama, mindset egosektoral masih mewarnai persepsi para *stakeholder*, Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi pemahaman dan pelaksanaan peran dari *stakeholder* untuk Pengelolaan klaster tambak budidaya udang vaname berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur. Oleh Karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kolaborasi antar stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengelolaan klaster tambak budidaya udang vaname berkelanjutan. Penelitian ini akan lebih menekankan secara terperinci tentang proses kolaborasi antar *stakeholder*, dan faktor-faktor yang menghambat kolaborasi pengelolaan klaster tambak budidaya udang vaname berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah terkait kolaborasi Pengelolaan klaster tambak budidaya udang vaname berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur agar lebih efektif.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sugiyono (2005:1). Pertimbangan terpilihnya pendekatan kualitatif tersebut dikarenakan masalah yang akan

diteliti masih bersifat kompleks, dinamis, dan bertujuan untuk memahami fenomena social serta tidak bermaksud generalisasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, konkrit, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, (Sugiyono, 2005:181). Dengan pendekatan kualitatif, penulis juga dapat memperoleh gambaran lebih mendalam, kebenaran data Tentang *collaborative governance* dalam pengembangan kawasan minapolitan berbasis udang vanname di kabupaten aceh timur. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 58) dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catata-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga mendapatkan data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan

Pembahasan Hasil Penelitian

Faktor Penghambat Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Udang Vanname Di Aceh Timur

Penghambat dalam kolaborasi pengembangan kawasan minapolitan berbasis udang vanname aceh timur berdasarkan penelitian yang klaster tambak udang vaname yang ada di Desa Matang Rayeuk yaitu access to resources yang ada pada masing masing stakeholder yang terlibat kolaborasi seperti Sumber Daya Manusia yang dimiliki dari segi kuantitas masih belum memadai atau mencukupi yang mengakibatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia khususnya pengetahuan tentang model klaster ini kurang baik, sehingga dalam melakukan kolaborasi masih kurang optimal, dalam menjalankan tugas sehari-hari yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia telah dilakukan dari masing-masing stakeholder juga tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Hambatan dalam kolaborasi terkait pengembangan kawasan minapolitan berbasis udang vanname antara lain: Pertama, Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia dalam proses *collaborative governance* ini sangat dibutuhkan. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam kolaborasi ini karena kurang SDM yang dapat menghandel atau memperbaiki perangkat yang digunakan dalam pembudidayaan klaster vanname modern ketika alat itu rusak, sehingga bila ada atau bahkan rusak itu tidak dapat diperbaiki lagi padahal harga untuk satuan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tandon air sangat mahal.

Kedua, Pemerintah kurang memfasilitasi dalam hal pengembangan. Selain Sumber Daya Manusia, Sumber Keuangan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder juga terbatas jumlahnya. Dalam proses kolaborasi tentu sangat membutuhkan dana untuk mendukung jalannya kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa pihak, dengan dana yang sedikit akan menjadi penghambat dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pihak swasta dan masyarakat karena tidak dapat memenuhi benih vanname dan perangkat untuk mengelola klaster tambak modern. Kurangnya Partisipasi Pihak Swasta. Pihak swasta kurang diikutsertakan dalam seluruh kegiatan pengembangan kawasan minapolitan berbasis udang vanname hingga terjadi sedikit permasalahan karena kurangnya komunikasi. Partisipasi adalah bentuk kesukarelaan atau pengikut sertaan seseorang atau lembaga dimana mereka bersedia terlibat dalam proses kerjasama atau kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan kolaborasi ini, partisipasi

dari berbagai pihak swasta baik perusahaan atau perorangan masih sangat kurang. Hal ini tentu akan menjadi faktor penghambat dalam kolaborasi pemerintahan

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengembangan kawasan minapolitan berbasis udang vanname Aceh Timur, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pengembangan kawasan minapolitan berbasis udang vanname berdasarkan teori Ansel dan Gash (2007) dapat dikategorikan sebagai praktek *collaborative governance* yang dijabarkan. Kondisi awal, yang dimulai dari tahap tersedianya lahan sebagai praktek *collaborative governance*, pengembangan kawasan minapolitan berbasis udang vanname, sumber dana yang digunakan, bergabungnya *stakeholders* ke klaster tambak terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik meskipun sementara masih terdapat hambatan. Desain kelembagaan kawasan minapolitan di dalam kolaborasi bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai leading sektor, sebagai pendukung BPBAP dalam melaksanakan riset, sebagai anggota kolaborasi dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), serta dukungan masyarakat Desa Matang Rayeuk berada di lingkungan kawasan minapolitan belum berjalan dengan baik. Kepemimpinan yang selama ini dilakukan dalam pengembangan kawasan minapolitan sudah berjalan dengan baik karena antara pengelola kawasan minapolitan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dengan *stakeholders* memiliki masing-masing tugas dan fungsinya dalam menjalankan kolaborasi.

Proses kolaborasi yang lebih ditekankan ialah pada tahap membangun kepercayaan karena tahap inilah yang menjadi bagian terpenting dalam berkolaborasi. Kepercayaan antar *stakeholders* yang terlibat belum berjalan dengan baik dibuktikan dengan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah daerah tentang program klaster tambak budidaya dan masyarakat tambak belum bisa menerima segala konsekuensi yang ada dalam berkolaborasi. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengembangan kawasan minapolitan berbasis udang vanname. Faktor penghambat, terdiri dari Keterbatasan Sumber daya dalam berkolaborasi Keterbatasan SDM dalam berkolaborasi belum memiliki persyaratan pendidikan formal maupun non formal yang dijadikan tenaga kerja siap pakai. Kesejahteraan belum terpenuhi secara sepenuhnya Di antara 7 Kecamatan yang mempunyai tambak terintegrasi Hanya di kawasan Desa Matang Rayeuk yang sudah melakukan pengembangan klaster tambak udang vanname seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kawasan minapolitan yang terintegrasi tambak bias dikembangkan menjadi klaster tambak berkelanjutan namun anggaran belum memadai. Sarana dan prasarana belum mencukupi Keterbatasan sarana dan prasarana menjadikan penghambat dalam memajukan klaster tambak budidaya. Partisipasi Masyarakat di desa Matang Rayeuk belum sepenuhnya mendukung namun sebagian besar sudah berkontribusi dengan baik karena disamping membuka lapangan pekerjaan dan memajukan infrastruktur Desa Matang Rayeuk juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

Daftar Pustaka

Zaman, M. Q. (2018). *Islam in Pakistan: A history* (Vol. 88). Princeton University Press.

Asti Amelia Novita *Collaborative Governance Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan*, Vol

4 Nomor 01

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agranoff, Robert Dan Michael Mcguire, 2003, *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*, Washington, D.C: Georgetown University Press
- Bryson, John. M, Crosby, Barbara.C&Stone, Melis, 2006. The Design and Implementation of Cross-sector Collaboration: Propositions from the Literature, *Public Administration Review*, Dec. 2006:44-5
- Chris Ansell and Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal Public Administration Research and Theory University of California. Hlm 554.
- Dewi, R. T. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengembangan industri kecil (studi kasus tentang kerajinan reyog dan pertunjukan reyog di kabupaten ponorogo)* Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif dan kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Emerson, Kirk dan Tina Nabatchi. 2015. *Collaborative Governance Regime*. Washington: Georgetown University. Hal 5-6
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. 2012. *An Integrative Framework for Collaborative Governance.* *Journal of Public Administration Research and Theory* Vol 22 No 1 Hal 3)
- Giat Tri Sambodo. 2016. *Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1*
- Haryono, Nanang. 2012. *Jejaring Untuk Mengembangkan Kolaborasi Sektor Publik*. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 1, Januari Juni 2012.*
- Fendt, Thomas Christian 2010, *Introducing Electronic Supply Chain Collaboration in China; Evidence from Manufacturing Industries*. Berlin: Universitätsverlag Der Technischen Universität Berlin
- Frederickson, H. George & Kevin B Smith. 2007. *The Public Administration Theory Primer*. United State of America: Westview Press.
- Jamilah, Ir. Mawardati, 2018. *Minapolitan Perikanan Tangkap Dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press
- Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.18/Men/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan.
- Program revitalisasi tambak udang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditetapkan sejak tahun 2012. (<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/38094>)
- Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, Abd. Rachim 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Tim DAP Press: Universitas Diponegoro Press
- Surat Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Nomor :1624/bpbap.Ub/Rc.2211sk/VI2020 Tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Tahun 2020- 2024.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 523/510/2010. *Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Aceh Timur*
- Thomson, A.M. and Perry, J.L. 2006. *Collaboration processes: Inside the black box*. *Journal Public Administration Review* Vol. 66 (Special Issue). Hal 23